



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUJARWANTO DWIATMOKO
2. Jabatan : ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 113902

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.204.700.000

1. Tanah Seluas 158 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 479 m2/84 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.158.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/150 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 545.350.000
4. Tanah Seluas 234 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 329.800.000
5. Tanah Seluas 1858 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 797.050.000
6. Tanah Seluas 442 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.126.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/215 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
8. Tanah Seluas 2465 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 468.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 275.200.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.200.000



3. LAINNYA, SEPEDA XIAOMI HIMO C20 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, UNITED T1800 A/T CRUISER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
5. MOBIL, HONDA HR-V RU5 1,8 RS CVT CKD MB PENUMPANG Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	288.718.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.029.872.994
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.798.490.994
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.798.490.994

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.